



<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

DOI ://doi.org/10.33369/jsn.7.1.115-130

**DUALITAS AGEN DAN STRUKTUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Program Kang Pisman  
Di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung)**

***DUALITY RELATIONSHIP OF AGENTS AND STRUCTURES  
IN WASTE MANAGEMENT  
(Study of case in the implementation of the Kang Pisman Program  
in Cibiru Sub District, Bandung City)***

**Ilham Hidayatulloh<sup>1</sup>, Yogi Suprayogi Sugandi<sup>2</sup>, Wahyu Gunawan<sup>3</sup>**

ilham.hidayatulloh92@gmail.com

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana Sosiologi, FISIP, Universitas Padjadjaran

**Abstrak**

Sampah di Kota Bandung sudah menjadi masalah yang krusial dan harus diselesaikan. Pemerintah Kota Bandung berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengolah sampah melalui program Kang Pisman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dualitas agen dan struktur dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens sebagai alat analisis yang menjelaskan mengenai konsep dualitas agen dan struktur dalam ruang waktu yang juga melibatkan praktik sosial agen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualitas agen dan struktur dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kota Bandung terjalin melalui skema signifikansi, dominasi serta legitimasi. Program Kang Pisman merupakan bentuk dari signifikansi dan dominasi Pemerintah Kota Bandung mewajibkan setiap OPD untuk melaksanakan program Kang Pisman secara mandiri dan memberikan instruksi kepada kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti dan menjalankan program Kang Pisman sedangkan legitimasi yang dibuat yaitu pemerintah merilis Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Di Kecamatan Cibiru program Kang Pisman dilaksanakan dengan inovasi yaitu program Nanjak sareng Kang Pisman. Dalam praktiknya kecamatan menggunakan dominasinya yaitu mewajibkan kepada para perangkat RW dan perangkat RT untuk melakukan sosialisasi tentang program Nanjak sareng Kang Pisman. Kecamatan Cibiru juga berkolaborasi dengan

bank sampah yang ada di RW 06 Palasari sebagai mitra bank sampah dalam pelaksanaan program Nanjak sareng Kang Pisman ini.

**Kata Kunci:** Agen, Dominasi, Dualitas, Kang Pisman, Sampah, Struktur

#### ***Abstract***

*The waste in Bandung has become a crucial problem and must be resolved. The Government seeks to resolve this problem by making a change in people's behavior in processing waste with Kang Pisman program. This study aims to examine the dual correlation between agent and structure in waste management. The study uses the theory of structuration from Anthony Giddens as a tool of analysis which explains the concept of duality agent and structure in time space which also involves the social practice of agents. This uses qualitative methods. The results of the research show that the duality agent and structure in the implementation of waste management programs is intertwined through a scheme of signification, domination, and legitimacy. The existence of the Kang Pisman program as a form of signification and government's domination. The government of Bandung City requires each Government Organization Staff to implement the Kang Pisman program independently and give instructions to the village and sub-district to participate and run implement the Kang Pisman program in their area. The legitimacy is that the government released Regulation No. 9 of 2018 about waste management. The implementation in Cibiru, the program was applied with new innovations, namely the Nanjak sareng Kang Pisman program. In practice the sub district uses its domination to provide information to RW and RT about the program. The apparatus of Cibiru Sub District also collaborates with the garbage bank in RW 06 Palasari as a partner of the waste bank in the implementation of the program.*

***Kata Kunci:*** Agent, Duality, Kang Pisman, Structure, Waste

#### **PENDAHULUAN**

“Buanglah sampah pada tempatnya”, bukan kalimat asing bagi orang Indonesia. Kalimat jargon tersebut sering dikampanyekan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik di lingkungan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah untuk menjaga agar lingkungan tetap bersih dan bebas dari sampah. Jargon buanglah sampah pada tempatnya dapat menjadi suatu kesalahan ketika sampah tidak dipilah sesuai dengan jenisnya dan sampah itu ditumpuk dalam satu tempat yang sama sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan perasaan jijik dan jorok yang mengganggu pikiran. Tidak memilah sampah adalah cikal bakal dari terjadinya penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah atau TPS.

Pada 21 Februari 2005, terjadi bencana yang sangat menggemparkan Indonesia. Titik puncak dampak dari paradigma lama pengelolaan sampah yang

hanya menggunakan metode kumpul angkut buang, pada hari itu, terjadi tragedi longsor di tempat pembuangan sampah akhir Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat. Longsoran sampah tersebut merenggut nyawa lebih dari 157 jiwa (Yudatama, 2020). Bersamaan dengan peristiwa itu pula muncul peristiwa Bandung Lautan Sampah, yang membuat Kota Bandung dalam kurun waktu yang 3 bulan tidak dapat membuang sampah ke tempat pembuangan akhir sampah, akibatnya sampah-sampah masyarakat ini bertumpuk menjadi timbunan sampah yang menggunung di setiap sudut jalan di Kota Bandung.

Pemerintah pada saat itu kesulitan untuk mencari tempat pembuangan akhir sampah pengganti mulai dari tempat pembuangan akhir sampah pengganti di Jelegong, Cicabe, Cikubang, dan Sarimukti semua hanya bersifat sementara karena batasan kapasitas lahan tempat pembuangan akhir sampah tersebut tidak memadai. Berbagai cara telah diupayakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk membuat inovasi dalam sistem pengelolaan sampah terpadu yang lebih modern.

Metode kumpul-angkut-buang mulai ditinggalkan dan berubah mejadi budaya pengurangan sampah di sumbernya secara langsung, atau yang dikenal dengan sebutan *zero waste lifestyle* dan program 3R yaitu *Reduce, Reuse, Recycle*. Kota Bandung pada tahun 2018 meluncurkan sebuah gerakan untuk mengatasi masalah persampahan yang ada di Kota Bandung dengan meluncurkan gerakan KANG (Kurangi) PIS (Pisahkan) MAN (Manfaatkan) sampah atau KANGPISMAN. Pemerintah mendorong masyarakat agar mengolah sampah di rumah, di RT dan RW hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

Metode pengolahan sampah yang dapat digunakan yaitu lubang sampah organik, biopori, komposter pipa untuk skala rumah tangga, lalu ada metode *biodigester*, magottisasi, bata terawang, kompos *windrow*, dan takakura untuk skala komunal yang difasilitasi juga oleh pemerintah. Pemerintah Kota Bandung melalui program Kang Pisman ini adalah untuk membangun perubahan perilaku di dalam masyarakat yang tentu saja sangat berat.

Pemerintah Kota Bandung sekarang ini berupaya melakukan perubahan sistem dari yang awalnya hanya mengatasi masalah di “hilir” yaitu dengan membangun banyak tempat pembuangan sampah sementara untuk kemudian

dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir yang tentu saja sudah tidak lagi efektif untuk terus diterapkan pada saat ini. Sekarang pemerintah mencoba untuk melakukan pencegahan pembuangan sampah mulai dari hulu, yaitu dari masyarakatnya sendiri dengan melakukan pemilahan sampah langsung dari awal sampah tersebut diproduksi sumbernya. Pengelolaan sampah yang baik akan menciptakan kebersihan yang indah dan nyaman. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan dualitas agen dan struktur dalam pengelolaan sampah melalui pelaksanaan program Kang Pisman di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?

Penelitian tentang pengelolaan sampah dan program pengelolaan sampah sudah banyak dikaji oleh para peneliti lain, seperti penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh Asteria dan Heruman (2016) yang berjudul bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya. Penelitian ini berpusat pada partisipasi warga khususnya perempuan dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan metode *Reduce, Reuse, Recycle, Replant* (4R) dan juga kepengurusan bank sampah di daerah Karang Resik. Hasilnya dengan kehadiran bank sampah mampu memotivasi terbentuknya kapasitas masyarakat untuk membentuk kesadaran, kemandirian, keswadayaan dan pengetahuan masyarakat sehingga mampu mendorong terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di masyarakat di daerah Karang Resik.

Penelitian yang dilakukan Nugraha (2017) dengan judul analisis efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga dengan menggunakan pendekatan bank sampah di Jakarta Selatan berfokus pada kelangsungan sistem kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di daerah Rajawati Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para responden memiliki persepsi positif dan juga ikut berpartisipasi secara aktif dalam membantu pengelolaan sampah rumah tangga. Terdapat suatu hubungan yang jelas antara faktor internal dengan eksternal individu di masyarakat sehingga jumlah sampah yang diterima oleh bank sampah pun meningkat, baik itu sampah organik atau anorganik.

Sekarningrum et al. (2020) melakukan penelitian yang berjudul sosialisasi dan edukasi Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah). Penelitian

ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat memiliki kesadaran sosial dan mampu mengubah perilaku dalam pengelolaan sampah melalui gerakan Kang Pisman. Berdasarkan hasil dari kegiatan penelitian tersebut didapatkan fakta bahwa masyarakat di daerah yang menjadi objek penelitian telah tersosialisasi dan teredukasi dengan baik dan menyeluruh. Tim penggerak PKK sebagai mitra kegiatan dalam sosialisasi Kang Pisman telah memiliki pengetahuan dasar dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi gerakan Kang Pisman ini kepada seluruh warga yang ada di wilayahnya, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah dari sumbernya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian yang dilakukan lebih berfokus kepada pengelolaan sampah, program bank sampah dan edukasi bank sampah yang ada di masyarakat. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada relasi struktur dan agen yang dalam hal ini struktur yang diwakili oleh pemerintah dan agen yang diwakili oleh pihak masyarakat dan pengelola bank sampah di dalam program kang pisman sebagai pelaku di lapangan dalam mengatasi permasalahan bank sampah tersebut.

Teori strukturasi yang digunakan pada penelitian ini lebih memfokuskan isu sampah yang bergulir di masyarakat ini, (Giddens, 2010) mengenalkan teori strukturasi yang merupakan salah satu metode dalam menjelaskan tentang agen dan struktur. Agen dan struktur memiliki keterkaitan satu sama lain. Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh agen merupakan cikal bakal dari kelahiran suatu struktur, dan istilah ini dalam pandangan George Ritzer disebut sebagai struktur sosial dan kekuatan sosial. Lantas (Giddens, 2010) mendefinisikan agen sebagai pelaku yang ikut terlibat dalam arus kontinu tindakan. Sebagai pelaku dalam praktik sosial, agen dapat dilihat sebagai individu atau pun sebagai suatu kelompok.

Hubungan agen struktur ini bukan hanya membentuk praktik sosial yang berulang-ulang, bukan hanya struktur yang diciptakan, tetapi ada juga yang disebut dengan refleksivitas (kesadaran). Refleksivitas ini merupakan gagasan yang Giddens pinjam dari Erving Goffman. Goffman mengemukakan bahwa sebagai agen mempunyai kemampuan untuk berintropeksi dan mawas diri.

Teori strukturasi memberikan kuasa kepada agen untuk mengubah keadaan sosial, yang artinya mengakui peran agen yang besar dalam menentukan praktik sosial. Struktur merupakan konsep penting dalam teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens, bahwa struktur bukanlah sesuatu yang berwujud benda, melainkan suatu skemata yang tampil hanya melalui praktik sosial.

Menurut (Abercrombie, Hill, dan Turner, 2010) dan Ritzer dan Goodman (2009) struktur sosial adalah hubungan antar individu dan institusi sosial dalam kehidupan masyarakat yang terjadi secara umum dan teratur. Struktur menurut Giddens, dikonsepsikan sebagai *rules* dan sumber daya yang memungkinkan praktik sosial terjadi di dalam suatu ruang dan waktu. Struktur adalah suatu aturan dan sumber daya yang memediasi perulangan praktik sosial.

Priyono (2016) dalam bukunya menjelaskan dualitas struktur terdapat proses struktur sosial merupakan *outcome* atau keluaran dan sekaligus menjadi sarana penengah praktik sosial. Artinya dalam dualitas agen dan struktur terdapat fakta bahwa struktur yang menjadi prinsip praktik-praktik sosial diberbagai ruang dan waktu adalah merupakan hasil dari pengulangan dan terjadi secara kontinu atau terus menerus dari berbagai praktik sosial yang masyarakat lakukan, dan sebaliknya, struktur juga menjadi medium praktik sosial masyarakat.

Agen dan struktur melakukan interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain, dan inilah yang disebut dengan suatu dualitas struktur. Melalui dualitas struktur inilah, hubungan antara agen dan struktur dapat terlihat secara jelas. Agen dengan jangkauan pengetahuan dan motivasi yang dimiliki dapat menjadikan struktur sebagai acuan dan juga alat dalam melakukan tindakan, kemudian dapat mengubah serta memproduksi struktur baru melalui praktik sosial yang sudah bersifat rutin. Struktur ketika secara aktif diproduksi, dan direproduksi, dan diubah oleh agen yang dilihat sebagai aktor yang memiliki kemampuan.

Ritzer (2012) dalam bukunya menjelaskan bahwa struktur terdapat dua aspek penting, yaitu aturan dan sumber daya. Aspek struktur sebagai aturan, yaitu struktur merupakan suatu prosedur yang dijadikan pedoman oleh agen dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Giddens (2010) terdapat tiga gugus struktur dalam kehidupan

sosial yaitu struktur dominasi merujuk pada skemata aturan penguasaan atas orang (politik) dan barang atau jasa (ekonomi).

Dominasi menunjukkan peran agen utama dalam hal ini pemerintah untuk membuat warga bisa mengikuti dominasi yang diberikan kepada warga. Struktur signifikasi merujuk pada skemata aturan simbolik penyebutan, pemaknaan dan wacana. Penyebutan tersebut terus terulang dalam kehidupan sosial. Struktur legitimasi merujuk pada skemata aturan peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum.

Ruang waktu dapat dikatakan sebagai lingkungan atau tempat terjadinya tindakan sosial dan di dalam ruang waktu ini juga terjadi pertemuan antar aktor, namun Giddens berpandangan bahwa ruang waktu secara keseluruhan merupakan faktor penyebab utama terbentuknya kegiatan sosial sehingga teori strukturasi ini meleburkan ruang dan waktu dalam konsep teori sosialnya.

Ruang dan waktu menurut Giddens (dalam Dwi Susilo, 2005) merupakan akar dari pembentukan subjek atau objek sosial, dan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat terbentuk dari ruang dan waktu tersebut. Ruang dan waktu bisa jadi merupakan suatu *historical process* atau proses historis yang dapat mempengaruhi susunan yang terdapat dalam agen yaitu struktur. Hal tersebut terjadi karena individu yang secara sadar melakukan suatu praktik sosial secara rutin dan berulang serta menjalani proses interaksi dengan aktor lain yang ada dalam ruang dan waktu dalam historisnya maka dapat menciptakan suatu struktur dimana struktur tersebut mampu mempengaruhi tindakan dari agen atau individu tersebut. Ketika praktik sosial terjadi tanpa perlu penjelasan dan alasan dalam pelaksanaannya maka hal tersebut merupakan bentuk dari reproduksi sosial. Reproduksi sosial ini berlangsung melalui hubungan dualitas struktur dan praktik sosial.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan kemudian dianalisis dengan metode studi kasus. Penelitian ini berupaya menganalisis tentang apa yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Penelitian ini berfokus pada hubungan masyarakat dan pemerintah

ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber dan jenis data menggunakan kata-kata dan tindakan serta sumber tertulis. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

Informan dipilih menggunakan *purposive sampling* yang relevan dengan penelitian. Informan tersebut merupakan bagian dari pelaksana pengelolaan sampah, yaitu dari Pemerintah Kota Bandung yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung dan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, serta aparat dari Kecamatan Cibiru, yaitu Camat dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Cibiru.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data di lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan aparat Kecamatan Cibiru dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program nanjak sareng kang pisman seperti bank sampah RW 06 Kelurahan Palasari dan bank sampah RW 06 Kelurahan Pasir Biru.

Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati dan mengikuti proses pelaksanaan program nanjak sareng kang pisman di Kecamatan Cibiru dan juga di bank sampah mitra kecamatan, dan dokumentasi mengenai program kang pisman dan nanjak sareng kang pisman sebagai alat penelitiannya. Data yang diperoleh kemudian direduksi, Lalu data tersebut disajikan berupa informasi yang terstruktur yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan yang sebelumnya sudah melalui tahapan triangulasi sumber data untuk memperoleh data yang valid dari penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Kang Pisman di Kecamatan Cibiru**

Penerapan Kang Pisman di Kecamatan Cibiru dilandasi oleh keinginan untuk melakukan optimalisasi pengelolaan sampah oleh masyarakat. Pemerintah Kecamatan Cibiru menginginkan masyarakatnya untuk dapat memilah sampah secara mandiri, dan juga menggolongkannya. Pengelolaan sampah dengan

menggunakan metode angkut-kumpul-buang itu memerlukan biaya yang sangat mahal, terutama untuk membuang sampah dari TPS ke TPA. Program Kang Pisman ini diharapkan masyarakat dapat mengolah sampahnya sedari di rumah dan mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA sehingga biaya yang dikeluarkan tidak akan terlalu mahal. Kecamatan Cibiru selalu memberikan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat, melalui pertemuan rutin RT dan RW serta kelembagaan seperti karang taruna dan juga PKK.

Kecamatan Cibiru juga mendorong para pegawai di lingkungan kantor kecamatan untuk melakukan program Kang Pisman di rumah masing-masing sehingga dapat dijadikan percontohan oleh masyarakat di sekitarnya. Kecamatan Cibiru juga memiliki bank sampah yang bernama cibiru mantap yang berada di kantor Kecamatan Cibiru. Bank sampah ini terbuka untuk masyarakat umum, agar dapat menyetorkan hasil sampahnya untuk kemudian ditabung dan menjadi uang.

Pihak kecamatan kemudian menjual sampah tersebut ke pengepul. Setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Cibiru memiliki bank sampah yang bertujuan untuk mengumpulkan sampah yang dibuang sembarangan oleh oknum masyarakat. Sampah hasil pembersihan sungai, di jalan, di tempat umum dikumpulkan, lalu dana yang terkumpul dari hasil penjualan sampah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan posyandu di setiap RW dan kegiatan masyarakat lainnya. Hasil dari penjualan sampah tersebut juga digunakan untuk insentif kepada para petugas gorong-gorong kebersihan (GOBER) dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan.

Pengawas pelaksanaan program Kang Pisman yaitu Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Cibiru dan Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan di kelurahan masing-masing. Pelaksanaan program Kang Pisman di tingkat RW memiliki cara yang berbeda-beda di lingkungannya, ada masyarakat yang masih dalam tahap memilah sampah, ada juga yang rutin melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampahnya. Pihak Kecamatan Cibiru mengakui bahwa pelaksanaan program bank sampah masih belum ideal. Pelaksanaan program sulit untuk dilaksanakan dengan berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan program. Program tersebut perlu dibuat inovasi yang membuat masyarakat tertarik dan ikut berkontribusi dalam pelaksanaan program

Kang Pisman ini. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah Kecamatan Cibiru yaitu program Nanjak sareng Kang Pisman. Program kecamatan yang digagas oleh Camat Cibiru berawal dari konsep pemanfaatan hasil bank sampah untuk dapat digunakan sebagai sarana pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Program Nanjak sareng Kang Pisman terbentuk dari proses pemanfaatan hasil dari bank sampah. Uang hasil dari bank sampah rata-rata digunakan oleh nasabah untuk kepentingan konsumsi, seperti membeli kebutuhan rumah tangga. Pada saat yang sama, lingkungan Kecamatan Cibiru sedang mengalami persoalan pajak kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan. Kecamatan Cibiru memiliki kasus cukup tinggi di Kota Bandung dalam hal penunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terjadi masyarakat tidak sadar terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan dan tidak adanya dana yang dimiliki oleh masyarakat untuk membayar kewajiban pajak tersebut.

Pemerintah kecamatan melakukan inovasi dengan mengalihkan dana tabungan bank sampah dimanfaatkan untuk membayar kewajiban pajak. Apabila nasabah tersebut memiliki pekerjaan tetap, beban untuk melakukan pembayaran pajak tidak akan menjadi masalah, tetapi bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu seperti petani dan pedagang, mereka memerlukan program seperti nanjak sareng kang pisman ini. Masyarakat wajib pajak ini banyak yang tidak mengetahui bahwa ketika memiliki kendaraan pribadi, masyarakat tidak hanya menanggung biaya servis kendaraan, bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga kewajiban pajak yang harus dibayar setiap tahunnya. Masyarakat perlu menyisihkan anggaran masing-masing untuk membayar pajak kendaraan tersebut. Kurangnya edukasi kewajiban pajak bagi para pemilik kendaraan mengakibatkan ketidaktahuan dan cenderung abai akan hal tersebut.

Program nanjak sareng kang pisman pada awalnya terpilih sebagai salah satu program yang menjadi juara pada ajang penghargaan anugerah pajak tahun 2019. Berawal dari Kota Bandung yang pada saat ini sedang gencar dalam melakukan sosialisasi tentang program Kang Pisman, dengan motto gerakan *nyaah ka Bandung*, dengan aksinya Bandung pisahkan sampah. Hasil temuan di lapangan menunjukkan pemanfaatan dana dari bank sampah ini masih digunakan untuk keperluan konsumsi.

Pihak kecamatan hanya mampu melakukan himbauan dan arahan kepada para nasabah bank sampah untuk pemanfaatan hasil tabungan sebagai pembayaran pajak. Pihak kecamatan tidak dapat memaksa para nasabah untuk melakukan hal tersebut, sehingga masih banyak yang menggunakan dana tabungan bank sampah untuk keperluan konsumsi. Pasca penerapan program ini selama setahun terjadi penurunan angka kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) dan kendaraan yang belum mendaftarkan ulang (KBMDU). Hal itu terjadi bukan hanya karena program nanjak sareng Kang Pisman saja, tetapi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi faktor utama dalam penurunan tersebut. Kecamatan Cibiru, cukup bangga dengan adanya penurunan masyarakat yang menunggak pajak di lingkungannya ini.

Pelaksanaan program penanganan sampah di kecamatan Cibiru tidak melibatkan banyak pihak, karena dasar program ini hanya program penanganan sampah sederhana. Pihak kelurahan hanya sebagai penghubung antara kecamatan dan RW dan RT yang ada di Cibiru, karena pada dasarnya program ini bertujuan untuk melakukan penerapan program Kang Pisman. Program ini kemudian diarahkan untuk menangani permasalahan sampah dan pajak kendaraan yang ada di Cibiru agar tujuannya jelas dan tercapai. Program nanjak sareng Kang Pisman ini bukan program yang istimewa, tetapi inovasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan ini belum ada yang melakukan, sehingga dianggap sebagai program yang menarik untuk dijadikan percontohan diberbagai daerah.

Gambar 1. Sosialisasi Program Nanjak Sareng Kang Pisman



*Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020*

Gambar diatas merupakan bentuk media komunikasi yang digunakan oleh pihak kecamatan yaitu mengadakan pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan sosialisasi pajak yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sosialisasi lain yang dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan dan penerangan kepada para RW dan RT dalam pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan di kecamatan.

### **Dualitas Agen dan Struktur dalam Pelaksanaan Program Kang Pisman**

Dualitas antara agen dan struktur dalam konteks pengelolaan sampah ini terjadi antara pemerintah Kota Bandung dan juga pemerintah Kecamatan Cibiru, melibatkan berbagai unsur yang ada dalam hubungan dualitas struktur dan agen. Gugus signifikansi yang digunakan yaitu program Kang Pisman dengan berbagai moto dan jargon serta urgensi dari program tersebut sebagai wacana dalam pengelolaan sampah dari rumah tangga dengan menggunakan metode 3R sebagai salah satu metode dalam mengurangi volume sampah yang ada di Kecamatan Cibiru.

Gugus legitimasi yang diterapkan antara hubungan dualitas struktur dan agen ini lebih kepada sosialisasi mengenai aturan-aturan baru tentang pelaksanaan program penanggulangan sampah seperti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat berikut sanksi yang akan diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Norma-norma hukum yang dibangun dari aturan ini reproduksi dengan melibatkan gugus signifikansi dan dominasi. Gugus dominasi membentuk praktik sosial pengelolaan sampah dilakukan secara berulang antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat karena dengan melakukan praktik sosial ini kemudian memunculkan suatu bentuk rutinitas sosial yang baru di masyarakat. rutinitas baru ini kemudian menjadi suatu kebiasaan baru yaitu kebiasaan kurangi pisahkan dan manfaatkan atau Kang Pisman.

Kebiasaan baru tersebut terbentuk melalui proses praktik sosial yang berulang-ulang sementara praktik sosial ini merupakan sarana dari realisasi norma-

norma hukum yang terus diberlakukan dalam tataran praktik sosial yang dilakukan dalam lingkup ruang dan waktu. Realitas kehidupan masyarakat di dalamnya terdapat keberadaan ruang dan waktu menjadi faktor penting dalam dinamika sosial masyarakat.

Giddens menyatakan bahwa ruang dan waktu berkaitan dengan pengekangan (*constraining*) yang membentuk rutinitas dari praktik sosial yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan menekankan pada tataran praktisnya, dan dalam ruang waktu ini terjadi interaksi yang kemudian membentuk perilaku sosial. Gagasan mengenai ruang dan waktu ini tidak hanya sebagai “arena” tetapi juga sebagai *setting* yang berasal dari berbagai praktik dan rutinitas sosial. Agen dalam pelaksanaannya dibentuk oleh struktur dan akan membentuk struktur baru dalam pertentangan ruang dan waktu yang dilatarbelakangi oleh terjadinya interaksi dalam ruang dan waktu tersebut. Pelaksanaan program Kang Pisman di Kecamatan Cibiru juga mengalami hal ini, selain sebagai agen, pemerintah kecamatan memiliki kesadaran diskursif yaitu dimana agen mampu melihat kondisi sosial dan mampu memberikan penjelasan secara rinci mengenai tindakan yang dilakukannya.

Pelaksanaan program Kang Pisman dapat direspon dengan baik oleh masyarakat, apabila terjadi suatu perubahan sosial di dalam masyarakat. Pemerintah Kecamatan Cibiru melalui camat dan Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Cibiru dapat dikatakan sebagai bagian dari *Agent of Change*. Agen ini keberadaannya harus dirasakan oleh masyarakat, ditambah kondisi sosial yang ada di daerah Kecamatan Cibiru juga memerlukan perubahan, yaitu perubahan pola perilaku pengelolaan sampah dan perubahan dalam hal ketaatan membayar pajak. Kecamatan Cibiru kemudian memunculkan inovasi sederhana untuk menghadapi kedua permasalahan tersebut yaitu nanjak sareng Kang Pisman sebagai perpaduan dari program Kang Pisman yaitu kurangi, pisahkan dan manfaatkan sampah, serta program taat bayar pajak yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Program nanjak sareng Kang Pisman ini merupakan signifikansi yang dibentuk agen dan upaya pemerintah Kecamatan Cibiru untuk menghadapi permasalahan sampah dan permasalahan penunggakan pembayaran pajak kendaraan

yang ada di lingkungan Kecamatan Cibiru. Program nanjak sareng Kang Pisman menggunakan metode sederhana yaitu masyarakat memilah sampah di rumah yang masih memiliki nilai guna dan nilai jual untuk ditabung di bank sampah kecamatan dan bank sampah yang menjadi mitra dari kecamatan.

Dana hasil tabungan sampah tersebut diarahkan untuk digunakan membayar pajak kendaraan motor milik nasabah bank sampah tersebut. Proses signifikansinya, program nanjak sareng Kang Pisman yang telah berjalan hampir satu tahun ini tidak terlalu dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Cibiru. Ketika di lapangan, peneliti mendapati bahwa dua orang yang menjadi informan penelitian tidak mengetahui tentang program nanjak sareng Kang Pisman ini. Informan tersebut padahal telah tinggal cukup lama di daerah tersebut namun karena kurangnya sosialisasi terkait program ini terutama dari pihak RT dan RW maka mereka tidak mengetahui mengenai program tersebut.

Gugus legitimasi yang digunakan mengacu kepada peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Pemerintah kecamatan juga melakukan pengawasan di setiap RW yang ada di lingkungan Kecamatan Cibiru demi menghindari tumpukan sampah. Pelaksanaan legitimasi yang ada di kecamatan masih sangat bergantung kepada program Kang Pisman yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung, sehingga memang tidak dapat mengakomodir program pembayaran pajak.

Lemahnya pelaksanaan legitimasi itu tidak terlepas dari pemerintah kecamatan yang hanya mampu memberikan himbauan dan arahan saja kepada masyarakat untuk mengikuti program nanjak sareng Kang Pisman ini. karena sifatnya hanya himbauan dan arahan sehingga tidak mengikat masyarakat untuk melaksanakan program nanjak sareng Kang Pisman. Oleh karena itu masyarakat masih lebih memilih untuk mencairkan dana hasil bank sampah tersebut untuk keperluan konsumsi dan tidak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah kecamatan menggunakan sktruktur dominasinya yaitu memberikan instruksi kepada RW dan RT di lingkungan Kecamatan Cibiru untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program nanjak sareng Kang

Pisman. Pemerintah Kecamatan Cibiru juga merangkul bank sampah di lingkungan kecamatan sebagai mitra dari bank sampah kecamatan pusat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program nanjak sareng Kang Pisman ini. Gugus dominasi yang digunakan pemerintah kecamatan tidak berjalan baik karena instruksi yang disampaikan oleh pihak kecamatan tidak disosialisasikan dengan baik di masyarakat. Karena kurangnya sosialisasi ini, masyarakat tidak terlalu mengenal program nanjak sareng Kang Pisman. Pemerintah Kecamatan Cibiru hanya merangkul satu bank sampah sebagai mitra dalam pelaksanaan program nanjak sareng Kang Pisman, padahal terdapat lebih dari lima bank sampah yang tersebar di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Cibiru, maka wajar apabila program nanjak sareng Kang Pisman ini kurang dikenal di masyarakat Cibiru secara luas.

## **KESIMPULAN**

Dualitas agen dan struktur dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru dilaksanakan melalui program Kang Pisman dengan menggunakan tiga gugus dalam struktur, yaitu signifikansi, dominasi, dan legitimasi. Gugus tersebut dalam praktik sosialnya menghasilkan agen perubahan yang membentuk pengelolaan sampah dengan inovasi baru, yaitu nanjak sareng Kang Pisman. Program nanjak sareng Kang Pisman di dalamnya juga memuat gugus signifikansi, dominasi dan legitimasi sebagai hasil dari praktik sosial yang terjadi dalam lingkup ruang dan waktu. Pelaksanaan nanjak sareng Kang Pisman tidak berjalan terlalu baik dan masih banyak kendala yang mempengaruhi pelaksanaan di lapangan. Proses dari pelaksanaan program itu membuktikan bahwa sistem dalam struktur terus direproduksi ulang sehingga membentuk suatu struktur baru yang sesuai dengan masyarakat di daerah tersebut. Penelitian kedepannya tentang pengelolaan sampah ini lebih ditekankan kepada peran ketokohan yang ada di masyarakat dalam menjadi panutan dalam pengelolaan sampah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abercrombie, Nicholas, Stephen Hill, and Bryan S. Turner. 2010. *Kamus Sosiologi Edisi Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Asteria, Donna, and Heru Heruman. 2016. "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya (Bank Sampah (Waste Banks) As An Alternative Of Community-Based Waste Management Strategy In Tasikmalaya)." *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23(1):136. doi: 10.22146/jml.18783.
- Dwi Susilo, Rachmad Kristiono. 2005. *Integrasi Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Arruz-Media.
- Giddens, A. 2010. *Teori Strukturasi; Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial (Edisi Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugraha, Aditya. 2017. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Bank Sampah Di Jakarta Selatan." nstitut Pertanian Bogor.
- Priyono, B. Herry. 2016. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: KPG.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Edisi Ke Delapan: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. 2009. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sekarningrum, Bintarsih, Yogi Suprayogi Sugandi, and Desi Yunita. 2020. "Sosialisasi Dan Edukasi Kangpisman (Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan Sampah)." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1):73. doi: 10.24198/kumawula.v3i1.25244.
- Yudatama, Satira. 2020. "157 Korban Jiwa Karena Longsor Sampah Pada 2005, Leuwigajah Kota Cimahi Jadi Lokasi Tapak Tilas HPSN."